



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAN KANTOR PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, serta memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2976.1/M.PANRB/8/2016 perihal Usulan Penataan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN), perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN.

BAB I

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di wilayahnya;
- b. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan, penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, penataan pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara;
- c. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan
- e. pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Wilayah dan pengoordinasian tugas dan pembinaan administrasi pada Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Infrastruktur Pertanahan;
- c. Bidang Hubungan Hukum Pertanahan;
- d. Bidang Penataan Pertanahan;
- e. Bidang Pengadaan Tanah; dan
- f. Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan;
- c. pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan;
- e. pengelolaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan;
- g. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan;
- h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan serta pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;
- c. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
- d. Subbagian Umum dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan, dan kegiatan pertanahan serta pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
- (2) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian serta pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
- (3) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.
- (4) Subbagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan, pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Bagian Keempat
Bidang Infrastruktur Pertanahan

Pasal 9

Bidang Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Infrastruktur Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar;
- b. pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
- c. pelaksanaan, koordinasi dan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik pada Kantor Pertanahan di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya;
- f. pelaksanaan, koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial;
- g. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;
- h. pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan, dan wilayah tertentu; dan
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur pertanahan.

Pasal 11

Bidang Infrastruktur Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar;
- b. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;
- c. Seksi Survei dan Pemetaan Tematik; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan, koordinasi dan pembinaan tenaga teknis dan surveyor pada Kantor Pertanahan di wilayahnya, pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan, pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya, pelaksanaan, koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Survei dan Pemetaan Tematik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu, dan pelaksanaan, koordinasi dan pembinaan tenaga teknis dan petugas survei dan pemetaan tematik pada Kantor Pertanahan di wilayahnya, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kelima
Bidang Hubungan Hukum Pertanahan

Pasal 13

Bidang Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah, dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan PPAT.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Hubungan Hukum Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan, dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal;
- b. penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda, dan bekas tanah asing lainnya;
- c. penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang;
- e. pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- f. penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- g. pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- h. pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak;

- i. pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/ komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT;
- j. pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis; dan
- k. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan hukum pertanahan.

Pasal 15

Bidang Hubungan Hukum Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat;
- b. Seksi Pendaftaran Hak Tanah;
- c. Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

- (1) Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan, dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal, penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda, dan bekas tanah asing lainnya, penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang, pelaksanaan

pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

- (2) Seksi Pendaftaran Hak Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak, serta evaluasi dan pelaporan
- (3) Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT, pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam
Bidang Penataan Pertanahan

Pasal 17

Bidang Penataan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan penatagunaan tanah, *landreform*, dan konsolidasi tanah, serta penataan kawasan tertentu.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek *landreform*, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek *landreform*, pengeluaran tanah dari obyek *landreform*, pendayagunaan tanah obyek *landreform* dan ganti kerugian tanah obyek *landreform*;
- d. pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah;
- e. pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah;
- g. pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu; dan

- h. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penataan pertanahan.

Pasal 19

Bidang Penataan Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Penatagunaan Tanah;
- b. Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah;
- c. Seksi Penataan Kawasan Tertentu; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1) Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi, pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek *landreform*, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek *landreform*, pengeluaran tanah dari obyek *landreform*, pendayagunaan tanah obyek *landreform* dan ganti kerugian tanah obyek *landreform*, pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah, pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan

data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah, serta evaluasi dan pelaporan.

- (3) Seksi Penataan Kawasan Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketujuh Bidang Pengadaan Tanah

Pasal 21

Bidang Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah, bina pengadaan dan penetapan tanah pemerintah, serta penilaian tanah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah;
- b. pembinaan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah;

- c. pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, dan badan usaha pemerintah;
- d. pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti;
- e. pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran, dan kerjasama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumberdaya agraria;
- f. pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan; dan
- g. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengadaan tanah.

Pasal 23

Bidang Pengadaan Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah;
- b. Seksi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah;
- c. Seksi Penilaian Tanah; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

- (1) Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pembinaan

perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah, pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, dan badan usaha pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan.

- (3) Seksi Penilaian Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti, pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran, dan kerjasama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumber daya agraria, pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedelapan

Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

Pasal 25

Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penanganan sengketa dan konflik pertanahan, penanganan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah;

- b. pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan;
- d. pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan masalah dan pengendalian pertanahan.

Pasal 27

Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- b. Seksi Penanganan Perkara Pertanahan;
- c. Seksi Pengendalian Pertanahan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

- (1) Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penanganan Perkara Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian, serta evaluasi dan pelaporan.

- (3) Seksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan, pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, serta evaluasi dan pelaporan.

BAB II

KANTOR PERTANAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 30

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- c. pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan penataan pertanahan;
- e. pelaksanaan pengadaan tanah;

- f. pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan
- g. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 32

Kantor Pertanahan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Infrastruktur Pertanahan;
- c. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- d. Seksi Penataan Pertanahan;
- e. Seksi Pengadaan Tanah; dan
- f. Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 33

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan;
- c. pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan;

- e. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan;
- g. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan; dan
- h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 35

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Urusan Umum dan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 36

- (1) Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan.
- (2) Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian, pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan, pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat.

- (3) Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Bagian Keempat
Seksi Infrastruktur Pertanahan

Pasal 37

Seksi Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Infrastruktur Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar;
- b. pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
- c. pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya;
- f. pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial;
- g. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;
- h. pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu; dan
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi infrastruktur pertanahan.

Pasal 39

Seksi Infrastruktur Pertanahan terdiri atas:

- a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik;
- b. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

- (1) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik, pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan, pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya, pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial, serta pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kelima
Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

Pasal 41

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan PPAT.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Hubungan Hukum Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal;
- b. penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya;
- c. penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang;
- e. pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- f. penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- g. pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- h. pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak;

- i. pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT;
- j. pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis; dan
- k. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi hubungan hukum pertanahan.

Pasal 43

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan terdiri atas:

- a. Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat;
- b. Subseksi Pendaftaran Hak Tanah;
- c. Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

- (1) Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal, penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya, penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, hak atas ruang, pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, penyiapan kerjasama dengan

lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

- (2) Subseksi Pendaftaran Hak Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak, serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT, serta pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam
Seksi Penataan Pertanahan

Pasal 45

Seksi Penataan Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penatagunaan tanah dan kawasan tertentu, *landreform* dan konsolidasi tanah.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek *landreform*, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek *landreform*, pengeluaran tanah dari obyek *landreform*, pendayagunaan tanah obyek *landreform* dan ganti kerugian tanah obyek *landreform*;
- d. pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah;
- e. pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah;
- g. pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu; dan
- h. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penataan pertanahan.

Pasal 47

Seksi Penataan Pertanahan terdiri atas:

- a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu;
- b. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

- (1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, mengelola basis data dan sistem informasi geografi, dan pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan, melaksanakan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek *landreform*, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek *landreform*, pengeluaran tanah dari obyek *landreform*, pendayagunaan tanah obyek *landreform* dan ganti kerugian tanah obyek *landreform*, serta redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah, dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi

dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketujuh
Seksi Pengadaan Tanah

Pasal 49

Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah, serta fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Seksi Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah;
- b. fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah;
- c. pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah;
- d. pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti;
- e. pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran dan kerjasama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumber daya agraria;

- f. pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan; dan
- g. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pengadaan tanah.

Pasal 51

Seksi Pengadaan Tanah terdiri atas:

- a. Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah;
- b. Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 52

- (1) Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, penilaian tanah, penilaian bidang tanah dan properti, pengadaan, pembuatan dan pemutakhiran peta zona nilai tanah kabupaten/kota, dan peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumberdaya agraria pengelolaan informasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah, pelaksanaan

penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedelapan

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

Pasal 53

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah;
- b. pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan;
- d. pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan.

Pasal 55

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan terdiri atas:

- a. Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- b. Subseksi Pengendalian Pertanahan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 56

- (1) Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan dan pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, serta evaluasi dan pelaporan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 57

Di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 60

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan menyampaikan laporan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 61

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan harus menyusun analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 62

Setiap unsur di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 63

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 64

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 65

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 68

- (1) Kepala Kantor Wilayah adalah jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang, jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalah jabatan struktural eselon V.a atau Jabatan Pelaksana.

Pasal 69

- (1) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Nama dan wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 71

Bagan Susunan Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 72

Perubahan atas organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, tetap berlaku beserta pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1874

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 38 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA
 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

| NO | KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI | WILAYAH KERJA |
|----|---|--|
| 1 | Aceh | Provinsi Aceh |
| 2 | Sumatera Utara | Provinsi Sumatera Utara |
| 3 | Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
| 4 | Riau | Provinsi Riau |
| 5 | Jambi | Provinsi Jambi |
| 6 | Sumatera Selatan | Provinsi Sumatera Selatan |
| 7 | Bengkulu | Provinsi Bengkulu |
| 8 | Lampung | Provinsi Lampung |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 10 | Kepulauan Riau | Provinsi Kepulauan Riau |
| 11 | DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta |
| 12 | Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| 13 | Jawa Tengah | Provinsi Jawa Tengah |
| 14 | Banten | Provinsi Banten |
| 15 | Jawa Timur | Provinsi Jawa Timur |
| 16 | DI Yogyakarta | Provinsi DI Yogyakarta |
| 17 | Bali | Provinsi Bali |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 20 | Kalimantan Barat | Provinsi Kalimantan Barat |
| 21 | Kalimantan Tengah | Provinsi Kalimantan Tengah |
| 22 | Kalimantan Selatan | Provinsi Kalimantan Selatan |
| 23 | Kalimantan Timur | Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Utara |
| 24 | Sulawesi Utara | Provinsi Sulawesi Utara |
| 25 | Sulawesi Tengah | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 26 | Sulawesi Selatan | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 27 | Sulawesi Tenggara | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 28 | Gorontalo | Provinsi Gorontalo |
| 29 | Sulawesi Barat | Provinsi Sulawesi Barat |
| 30 | Maluku | Provinsi Maluku |
| 31 | Maluku Utara | Provinsi Maluku Utara |
| 32 | Papua | Provinsi Papua |
| 33 | Papua Barat | Provinsi Papua Barat |

DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA
KANTOR PERTANAHAN

| NO | KANTOR PERTANAHAN | WILAYAH KERJA |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Provinsi Aceh | |
| | 1 Kota Banda Aceh | Kota Banda Aceh |
| | 2 Kabupaten Aceh Besar | Kabupaten Aceh Besar |
| | 3 Kabupaten Aceh Timur | Kabupaten Aceh Timur |
| | 4 Kabupaten Aceh Tengah | Kabupaten Aceh Tengah |
| | | Kabupaten Bener Meriah |
| | 5 Kabupaten Bireuen | Kabupaten Bireuen |
| | 6 Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe |
| | 7 Kabupaten Aceh Barat | Kabupaten Aceh Barat |
| | 8 Kabupaten Aceh Tamiang | Kabupaten Aceh Tamiang |
| | 9 Kabupaten Pidie | Kabupaten Pidie |
| | 10 Kabupaten Aceh Utara | Kabupaten Aceh Utara |
| | 11 Kabupaten Aceh Tenggara | Kabupaten Aceh Tenggara |
| | 12 Kabupaten Nagan Raya | Kabupaten Nagan Raya |
| | 13 Kabupaten Aceh Singkil | Kabupaten Aceh Singkil |
| | | Kota Subulussalam |
| | 14 Kabupaten Aceh Selatan | Kabupaten Aceh Selatan |
| | 15 Kabupaten Aceh Jaya | Kabupaten Aceh Jaya |
| | 16 Kota Sabang | Kota Sabang |
| | 17 Kabupaten Simeulue | Kabupaten Simeulue |
| | 18 Kota Langsa | Kota Langsa |
| 19 Kabupaten Aceh Barat Daya | Kabupaten Aceh Barat Daya | |
| 20 Kabupaten Gayo Lues | Kabupaten Gayo Lues | |
| 21 Kabupaten Pidie Jaya | Kabupaten Pidie Jaya | |
| 2 | Provinsi Sumatera Utara | |
| | 1 Kota Medan | Kota Medan |
| | 2 Kabupaten Deli Serdang | Kabupaten Deli Serdang |
| | 3 Kabupaten Labuhanbatu | Kabupaten Labuhanbatu |
| | | Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| | | Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| | 4 Kabupaten Asahan | Kabupaten Asahan |
| | | Kabupaten Batubara |
| | 5 Kabupaten Simalungun | Kabupaten Simalungun |
| | 6 Kota Pematang Siantar | Kota Pematang Siantar |
| | 7 Kabupaten Serdang Bedagai | Kabupaten Serdang Bedagai |
| | 8 Kabupaten Langkat | Kabupaten Langkat |
| | 9 Kabupaten Tapanuli Selatan | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| | | Kabupaten Padang Lawas Utara |
| | | Kabupaten Padang Lawas |
| | 10 Kabupaten Mandailing Natal | Kabupaten Mandailing Natal |
| 11 Kota Binjai | Kota Binjai | |
| 12 Kabupaten Karo | Kabupaten Karo | |
| 13 Kota Tebing Tinggi | Kota Tebing Tinggi | |
| 14 Kabupaten Tapanuli Tengah | Kabupaten Tapanuli Tengah | |
| 15 Kota Padang Sidempuan | Kota Padang Sidempuan | |
| 16 Kabupaten Nias | Kabupaten Nias | |
| | Kabupaten Nias Utara | |
| | Kabupaten Nias Barat | |
| | Kota Gunungsitoli | |

| NO | KANTOR PERTANAHAN | WILAYAH KERJA |
|----|----------------------------------|--------------------------------|
| | 17 Kota Tanjung Balai | Kota Tanjung Balai |
| | 18 Kabupaten Tapanuli Utara | Kabupaten Tapanuli Utara |
| | 19 Kabupaten Dairi | Kabupaten Dairi |
| | 20 Kabupaten Humbang Hasundutan | Kabupaten Humbang Hasundutan |
| | 21 Kabupaten Toba Samosir | Kabupaten Toba Samosir |
| | 22 Kota Sibolga | Kota Sibolga |
| | 23 Kabupaten Samosir | Kabupaten Samosir |
| | 24 Kabupaten Pakpak Bharat | Kabupaten Pakpak Bharat |
| | 25 Kabupaten Nias Selatan | Kabupaten Nias Selatan |
| 3 | Provinsi Sumatera Barat | |
| | 1 Kota Padang | Kota Padang |
| | 2 Kabupaten Dharmasraya | Kabupaten Dharmasraya |
| | 3 Kabupaten Pasaman Barat | Kabupaten Pasaman Barat |
| | 4 Kabupaten Agam | Kabupaten Agam |
| | 5 Kabupaten Lima Puluh Kota | Kabupaten Lima Puluh Kota |
| | 6 Kota Payakumbuh | Kota Payakumbuh |
| | 7 Kabupaten Padang Pariaman | Kabupaten Padang Pariaman |
| | 8 Kabupaten Tanah Datar | Kabupaten Tanah Datar |
| | 9 Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi |
| | 10 Kabupaten Solok | Kabupaten Solok |
| | 11 Kabupaten Sijunjung | Kabupaten Sijunjung |
| | 12 Kabupaten Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan |
| | 13 Kota Solok | Kota Solok |
| | 14 Kabupaten Solok Selatan | Kabupaten Solok Selatan |
| | 15 Kota Pariaman | Kota Pariaman |
| | 16 Kabupaten Pasaman | Kabupaten Pasaman |
| | 17 Kota Padang Panjang | Kota Padang Panjang |
| | 18 Kota Sawahlunto | Kota Sawahlunto |
| | 19 Kabupaten Kepulauan Mentawai | Kabupaten Kepulauan Mentawai |
| 4 | Provinsi Riau | |
| | 1 Kota Pekanbaru | Kota Pekanbaru |
| | 2 Kabupaten Kampar | Kabupaten Kampar |
| | 3 Kabupaten Bengkalis | Kabupaten Bengkalis |
| | 4 Kabupaten Pelalawan | Kabupaten Pelalawan |
| | 5 Kabupaten Indragiri Hulu | Kabupaten Indragiri Hulu |
| | 6 Kabupaten Indragiri Hilir | Kabupaten Indragiri Hilir |
| | 7 Kabupaten Siak | Kabupaten Siak |
| | 8 Kabupaten Rokan Hulu | Kabupaten Rokan Hulu |
| | 9 Kabupaten Rokan Hilir | Kabupaten Rokan Hilir |
| | 10 Kota Dumai | Kota Dumai |
| | 11 Kabupaten Kuantan Singingi | Kabupaten Kuantan Singingi |
| | 12 Kabupaten Kepulauan Meranti | Kabupaten Kepulauan Meranti |
| 5 | Provinsi Jambi | |
| | 1 Kota Jambi | Kota Jambi |
| | 2 Kabupaten Muaro Jambi | Kabupaten Muaro Jambi |
| | 3 Kabupaten Tebo | Kabupaten Tebo |
| | 4 Kabupaten Bungo | Kabupaten Bungo |
| | 5 Kabupaten Merangin | Kabupaten Merangin |
| | 6 Kabupaten Sarolangun | Kabupaten Sarolangun |
| | 7 Kabupaten Batanghari | Kabupaten Batanghari |
| | 8 Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| | 9 Kabupaten Kerinci | Kabupaten Kerinci |

| NO | KANTOR PERTANAHAN | | WILAYAH KERJA |
|----|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | 10 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
| | 11 | Kota Sungai Penuh | Kota Sungai Penuh |
| 6 | Provinsi Sumatera Selatan | | |
| | 1 | Kota Palembang | Kota Palembang |
| | 2 | Kabupaten Musi Rawas | Kabupaten Musi Rawas |
| | | | Kabupaten Musi Rawas Utara |
| | 3 | Kabupaten Musi Banyuasin | Kabupaten Musi Banyuasin |
| | 4 | Kabupaten Muara Enim | Kabupaten Muara Enim |
| | | | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir |
| | 5 | Kota Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
| | 6 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Kabupaten Ogan Komering Ulu |
| | 7 | Kabupaten Banyuasin | Kabupaten Banyuasin |
| | 8 | Kabupaten Lahat | Kabupaten Lahat |
| | 9 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kabupaten Ogan Komering Ilir |
| | 10 | Kabupaten Oku Timur | Kabupaten Oku Timur |
| | 11 | Kota Prabumulih | Kota Prabumulih |
| | 12 | Kota Pagar Alam | Kota Pagar Alam |
| 13 | Kabupaten Ogan Ilir | Kabupaten Ogan Ilir | |
| 14 | Kabupaten Empat Lawang | Kabupaten Empat Lawang | |
| 15 | Kabupaten Oku Selatan | Kabupaten Oku Selatan | |
| 7 | Provinsi Bengkulu | | |
| | 1 | Kota Bengkulu | Kota Bengkulu |
| | 2 | Kabupaten Bengkulu Utara | Kabupaten Bengkulu Utara |
| | 3 | Kabupaten Rejang Lebong | Kabupaten Rejang Lebong |
| | 4 | Kabupaten Mukomuko | Kabupaten Mukomuko |
| | 5 | Kabupaten Bengkulu Selatan | Kabupaten Bengkulu Selatan |
| | 6 | Kabupaten Seluma | Kabupaten Seluma |
| | 7 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Kabupaten Bengkulu Tengah |
| | 8 | Kabupaten Kepahiang | Kabupaten Kepahiang |
| | 9 | Kabupaten Kaur | Kabupaten Kaur |
| 10 | Kabupaten Lebong | Kabupaten Lebong | |
| 8 | Provinsi Lampung | | |
| | 1 | Kota Bandar Lampung | Kota Bandar Lampung |
| | 2 | Kabupaten Lampung Selatan | Kabupaten Lampung Selatan |
| | 3 | Kabupaten Lampung Tengah | Kabupaten Lampung Tengah |
| | 4 | Kabupaten Lampung Utara | Kabupaten Lampung Utara |
| | 5 | Kabupaten Tulang Bawang | Kabupaten Tulang Bawang |
| | | | Kabupaten Mesuji |
| | | | Kabupaten Tulang Bawang Barat |
| | 6 | Kabupaten Tanggamus | Kabupaten Tanggamus |
| | 7 | Kabupaten Pringsewu | Kabupaten Pringsewu |
| | 8 | Kabupaten Lampung Timur | Kabupaten Lampung Timur |
| | 9 | Kota Metro | Kota Metro |
| 10 | Kabupaten Pesawaran | Kabupaten Pesawaran | |
| 11 | Kabupaten Lampung Barat | Kabupaten Lampung Barat | |
| | | Kabupaten Pesisir Barat | |
| 12 | Kabupaten Way Kanan | Kabupaten Way Kanan | |
| 9 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | |
| | 1 | Kota Pangkalpinang | Kota Pangkalpinang |
| | 2 | Kabupaten Belitung | Kabupaten Belitung |
| 3 | Kabupaten Bangka | Kabupaten Bangka | |

| NO | KANTOR PERTANAHAN | | WILAYAH KERJA |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| | 4 | Kabupaten Bangka Barat | Kabupaten Bangka Barat |
| | 5 | Kabupaten Belitung Timur | Kabupaten Belitung Timur |
| | 6 | Kabupaten Bangka Tengah | Kabupaten Bangka Tengah |
| | 7 | Kabupaten Bangka Selatan | Kabupaten Bangka Selatan |
| 10 | Provinsi Kepulauan Riau | | |
| | 1 | Kota Batam | Kota Batam |
| | 2 | Kota Tanjung Pinang | Kota Tanjung Pinang |
| | 3 | Kabupaten Bintan | Kabupaten Bintan |
| | 4 | Kabupaten Karimun | Kabupaten Karimun |
| | 5 | Kabupaten Lingga | Kabupaten Lingga |
| | 6 | Kabupaten Natuna | Kabupaten Natuna |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Kabupaten Kepulauan Anambas | |
| 11 | Provinsi DKI Jakarta | | |
| | 1 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Kota Administrasi Jakarta Barat |
| | 2 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| | 3 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Kota Administrasi Jakarta Utara |
| | | | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu |
| | 4 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Kota Administrasi Jakarta Timur |
| 5 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Kota Administrasi Jakarta Pusat | |
| 12 | Provinsi Jawa Barat | | |
| | 1 | Kabupaten Bekasi | Kabupaten Bekasi |
| | 2 | Kabupaten Bogor | Kabupaten Bogor |
| | 3 | Kota Bekasi | Kota Bekasi |
| | 4 | Kota Depok | Kota Depok |
| | 5 | Kota Bandung | Kota Bandung |
| | 6 | Kabupaten Cirebon | Kabupaten Cirebon |
| | 7 | Kabupaten Bandung | Kabupaten Bandung |
| | 8 | Kabupaten Karawang | Kabupaten Karawang |
| | 9 | Kota Tasikmalaya | Kota Tasikmalaya |
| | 10 | Kabupaten Sukabumi | Kabupaten Sukabumi |
| | 11 | Kabupaten Bandung Barat | Kabupaten Bandung Barat |
| | 12 | Kota Bogor | Kota Bogor |
| | 13 | Kabupaten Indramayu | Kabupaten Indramayu |
| | 14 | Kabupaten Cianjur | Kabupaten Cianjur |
| | 15 | Kabupaten Subang | Kabupaten Subang |
| | 16 | Kabupaten Ciamis | Kabupaten Ciamis |
| | 17 | Kabupaten Pangandaran | Kabupaten Pangandaran |
| | 18 | Kabupaten Purwakarta | Kabupaten Purwakarta |
| | 19 | Kabupaten Garut | Kabupaten Garut |
| | 20 | Kabupaten Sumedang | Kabupaten Sumedang |
| | 21 | Kabupaten Tasikmalaya | Kabupaten Tasikmalaya |
| | 22 | Kota Cirebon | Kota Cirebon |
| | 23 | Kota Cimahi | Kota Cimahi |
| | 24 | Kabupaten Kuningan | Kabupaten Kuningan |
| | 25 | Kota Sukabumi | Kota Sukabumi |
| | 26 | Kabupaten Majalengka | Kabupaten Majalengka |
| 27 | Kota Banjar | Kota Banjar | |
| 13 | Provinsi Jawa Tengah | | |
| | 1 | Kota Semarang | Kota Semarang |
| | 2 | Kabupaten Sukoharjo | Kabupaten Sukoharjo |
| | 3 | Kabupaten Banyumas | Kabupaten Banyumas |

| NO | KANTOR PERTANAHAN | WILAYAH KERJA | |
|----|---------------------|------------------------|------------------------|
| | 4 | Kabupaten Karanganyar | Kabupaten Karanganyar |
| | 5 | Kabupaten Klaten | Kabupaten Klaten |
| | 6 | Kabupaten Sragen | Kabupaten Sragen |
| | 7 | Kabupaten Tegal | Kabupaten Tegal |
| | 8 | Kabupaten Magelang | Kabupaten Magelang |
| | 9 | Kabupaten Semarang | Kabupaten Semarang |
| | 10 | Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap |
| | 11 | Kabupaten Pati | Kabupaten Pati |
| | 12 | Kabupaten Demak | Kabupaten Demak |
| | 13 | Kabupaten Kendal | Kabupaten Kendal |
| | 14 | Kabupaten Jepara | Kabupaten Jepara |
| | 15 | Kabupaten Wonogiri | Kabupaten Wonogiri |
| | 16 | Kabupaten Kudus | Kabupaten Kudus |
| | 17 | Kabupaten Grobogan | Kabupaten Grobogan |
| | 18 | Kabupaten Pemalang | Kabupaten Pemalang |
| | 19 | Kabupaten Temanggung | Kabupaten Temanggung |
| | 20 | Kabupaten Boyolali | Kabupaten Boyolali |
| | 21 | Kabupaten Kebumen | Kabupaten Kebumen |
| | 22 | Kabupaten Purbalingga | Kabupaten Purbalingga |
| | 23 | Kabupaten Banjarnegara | Kabupaten Banjarnegara |
| | 24 | Kabupaten Brebes | Kabupaten Brebes |
| | 25 | Kota Surakarta | Kota Surakarta |
| | 26 | Kabupaten Wonosobo | Kabupaten Wonosobo |
| | 27 | Kabupaten Pekalongan | Kabupaten Pekalongan |
| | 28 | Kabupaten Batang | Kabupaten Batang |
| | 29 | Kabupaten Blora | Kabupaten Blora |
| | 30 | Kota Tegal | Kota Tegal |
| | 31 | Kota Salatiga | Kota Salatiga |
| | 32 | Kabupaten Purworejo | Kabupaten Purworejo |
| | 33 | Kota Pekalongan | Kota Pekalongan |
| | 34 | Kabupaten Rembang | Kabupaten Rembang |
| | 35 | Kota Magelang | Kota Magelang |
| 14 | Provinsi Banten | | |
| | 1 | Kabupaten Tangerang | Kabupaten Tangerang |
| | 2 | Kota Tangerang | Kota Tangerang |
| | 3 | Kabupaten Serang | Kabupaten Serang |
| | | | Kota Serang |
| | 4 | Kota Cilegon | Kota Cilegon |
| | 5 | Kabupaten Lebak | Kabupaten Lebak |
| | 6 | Kabupaten Pandeglang | Kabupaten Pandeglang |
| | 7 | Kota Tangerang Selatan | Kota Tangerang Selatan |
| 15 | Provinsi Jawa Timur | | |
| | 1 | Kota Surabaya I | Kota Surabaya |
| | 2 | Kota Surabaya II | |
| | 3 | Kabupaten Sidoarjo | Kabupaten Sidoarjo |
| | 4 | Kabupaten Gresik | Kabupaten Gresik |
| | 5 | Kota Malang | Kota Malang |
| | 6 | Kabupaten Malang | Kabupaten Malang |
| | 7 | Kabupaten Kediri | Kabupaten Kediri |
| | 8 | Kabupaten Mojokerto | Kabupaten Mojokerto |
| | 9 | Kabupaten Banyuwangi | Kabupaten Banyuwangi |
| | 10 | Kabupaten Bojonegoro | Kabupaten Bojonegoro |
| | 11 | Kabupaten Jombang | Kabupaten Jombang |

| NO | KANTOR PERTANAHAN | WILAYAH KERJA | |
|----|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 12 | Kabupaten Jember | Kabupaten Jember |
| | 13 | Kabupaten Pasuruan | Kabupaten Pasuruan |
| | 14 | Kabupaten Lamongan | Kabupaten Lamongan |
| | 15 | Kabupaten Madiun | Kabupaten Madiun |
| | 16 | Kabupaten Tulungagung | Kabupaten Tulungagung |
| | 17 | Kabupaten Magetan | Kabupaten Magetan |
| | 18 | Kabupaten Blitar | Kabupaten Blitar |
| | 19 | Kabupaten Nganjuk | Kabupaten Nganjuk |
| | 20 | Kabupaten Trenggalek | Kabupaten Trenggalek |
| | 21 | Kabupaten Situbondo | Kabupaten Situbondo |
| | 22 | Kabupaten Bangkalan | Kabupaten Bangkalan |
| | 23 | Kabupaten Tuban | Kabupaten Tuban |
| | 24 | Kabupaten Ngawi | Kabupaten Ngawi |
| | 25 | Kabupaten Lumajang | Kabupaten Lumajang |
| | 26 | Kota Madiun | Kota Madiun |
| | 27 | Kota Kediri | Kota Kediri |
| | 28 | Kabupaten Probolinggo | Kabupaten Probolinggo |
| | 29 | Kota Probolinggo | Kota Probolinggo |
| | 30 | Kota Batu | Kota Batu |
| | 31 | Kabupaten Ponorogo | Kabupaten Ponorogo |
| | 32 | Kota Mojokerto | Kota Mojokerto |
| | 33 | Kabupaten Sumenep | Kabupaten Sumenep |
| | 34 | Kabupaten Pamekasan | Kabupaten Pamekasan |
| | 35 | Kota Pasuruan | Kota Pasuruan |
| | 36 | Kabupaten Bondowoso | Kabupaten Bondowoso |
| | 37 | Kota Blitar | Kota Blitar |
| | 38 | Kabupaten Sampang | Kabupaten Sampang |
| | 39 | Kabupaten Pacitan | Kabupaten Pacitan |
| 16 | Provinsi DI Yogyakarta | | |
| | 1 | Kabupaten Sleman | Kabupaten Sleman |
| | 2 | Kabupaten Bantul | Kabupaten Bantul |
| | 3 | Kota Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
| | 4 | Kabupaten Gunungkidul | Kabupaten Gunungkidul |
| | 5 | Kabupaten KulonProgo | Kabupaten KulonProgo |
| 17 | Provinsi Bali | | |
| | 1 | Kabupaten Badung | Kabupaten Badung |
| | 2 | Kabupaten Buleleng | Kabupaten Buleleng |
| | 3 | Kabupaten Tabanan | Kabupaten Tabanan |
| | 4 | Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| | 5 | Kabupaten Gianyar | Kabupaten Gianyar |
| | 6 | Kabupaten Karangasem | Kabupaten Karangasem |
| | 7 | Kabupaten Jembrana | Kabupaten Jembrana |
| | 8 | Kabupaten Klungkung | Kabupaten Klungkung |
| | 9 | Kabupaten Bangli | Kabupaten Bangli |
| 18 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | |
| | 1 | Kota Mataram | Kota Mataram |
| | 2 | Kabupaten Lombok Barat | Kabupaten Lombok Barat |
| | 3 | Kabupaten Lombok Timur | Kabupaten Lombok Timur |
| | 4 | Kabupaten Lombok Tengah | Kabupaten Lombok Tengah |
| | 5 | Kabupaten Sumbawa | Kabupaten Sumbawa |
| | 6 | Kabupaten Bima | Kabupaten Bima |
| | 7 | Kota Bima | Kota Bima |
| | 8 | Kabupaten Dompu | Kabupaten Dompu |

| NO | KANTOR PERTANAHAN | WILAYAH KERJA |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|
| | 9 Kabupaten Lombok Utara | Kabupaten Lombok Utara |
| | 10 Kabupaten Sumbawa Barat | Kabupaten Sumbawa Barat |
| 19 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| | 1 Kota Kupang | Kota Kupang |
| | 2 Kabupaten Sikka | Kabupaten Sikka |
| | 3 Kabupaten Kupang | Kabupaten Kupang |
| | 4 Kabupaten Sabu Raijua | Kabupaten Sabu Raijua |
| | 5 Kabupaten Belu | Kabupaten Belu |
| | 6 Kabupaten Malaka | Kabupaten Malaka |
| | 7 Kabupaten Manggarai Barat | Kabupaten Manggarai Barat |
| | 8 Kabupaten Sumba Timur | Kabupaten Sumba Timur |
| | 9 Kabupaten Ende | Kabupaten Ende |
| | 10 Kabupaten Sumba Barat Daya | Kabupaten Sumba Barat Daya |
| | 11 Kabupaten Flores Timur | Kabupaten Flores Timur |
| | 12 Kabupaten Lembata | Kabupaten Lembata |
| | 13 Kabupaten Ngada | Kabupaten Ngada |
| | 14 Kabupaten Manggarai | Kabupaten Manggarai |
| | 15 Kabupaten Timor Tengah Utara | Kabupaten Timor Tengah Utara |
| | 16 Kabupaten Timor Tengah Selatan | Kabupaten Timor Tengah Selatan |
| | 17 Kabupaten Alor | Kabupaten Alor |
| | 18 Kabupaten Rote Ndao | Kabupaten Rote Ndao |
| | 19 Kabupaten Nagekeo | Kabupaten Nagekeo |
| | 20 Kabupaten Sumba Barat | Kabupaten Sumba Barat |
| | 21 Kabupaten Sumba Tengah | Kabupaten Sumba Tengah |
| | 22 Kabupaten Manggarai Timur | Kabupaten Manggarai Timur |
| 20 | Provinsi Kalimantan Barat | |
| | 1 Kota Pontianak | Kota Pontianak |
| | 2 Kabupaten Kubu Raya | Kabupaten Kubu Raya |
| | 3 Kabupaten Sambas | Kabupaten Sambas |
| | 4 Kota Singkawang | Kota Singkawang |
| | 5 Kabupaten Sintang | Kabupaten Sintang |
| | 6 Kabupaten Ketapang | Kabupaten Ketapang |
| | 7 Kabupaten Mempawah | Kabupaten Mempawah |
| | 8 Kabupaten Sanggau | Kabupaten Sanggau |
| | 9 Kabupaten Bengkayang | Kabupaten Bengkayang |
| | 10 Kabupaten Landak | Kabupaten Landak |
| | 11 Kabupaten Melawi | Kabupaten Melawi |
| | 12 Kabupaten Sekadau | Kabupaten Sekadau |
| | 13 Kabupaten Kapuas Hulu | Kabupaten Kapuas Hulu |
| | 14 Kabupaten Kayong Utara | Kabupaten Kayong Utara |
| 21 | Provinsi Kalimantan Tengah | |
| | 1 Kota Palangkaraya | Kota Palangkaraya |
| | 2 Kabupaten Kotawaringin Timur | Kabupaten Kotawaringin Timur |
| | 3 Kabupaten Kotawaringin Barat | Kabupaten Kotawaringin Barat |
| | 4 Kabupaten Barito Utara | Kabupaten Barito Utara |
| | 5 Kabupaten Kapuas | Kabupaten Kapuas |
| | 6 Kabupaten Barito Selatan | Kabupaten Barito Selatan |
| | 7 Kabupaten Barito Timur | Kabupaten Barito Timur |
| | 8 Kabupaten Katingan | Kabupaten Katingan |
| | 9 Kabupaten Murung Raya | Kabupaten Murung Raya |
| | 10 Kabupaten Gunung Mas | Kabupaten Gunung Mas |
| | 11 Kabupaten Lamandau | Kabupaten Lamandau |
| | 12 Kabupaten Seruyan | Kabupaten Seruyan |

| NO | KANTOR PERTANAHAN | | WILAYAH KERJA |
|----|--|--|-------------------------------------|
| | 13 | Kabupaten Pulang Pisau | Kabupaten Pulang Pisau |
| | 14 | Kabupaten Sukamara | Kabupaten Sukamara |
| 22 | Provinsi Kalimantan Selatan | | |
| | 1 | Kota Banjarmasin | Kota Banjarmasin |
| | 2 | Kota Banjarbaru | Kota Banjarbaru |
| | 3 | Kabupaten Banjar | Kabupaten Banjar |
| | 4 | Kabupaten Tanah Laut | Kabupaten Tanah Laut |
| | 5 | Kabupaten Tanah Bumbu | Kabupaten Tanah Bumbu |
| | 6 | Kabupaten Barito Kuala | Kabupaten Barito Kuala |
| | 7 | Kabupaten Tabalong | Kabupaten Tabalong |
| | 8 | Kabupaten Kotabaru | Kabupaten Kotabaru |
| | 9 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Kabupaten Hulu Sungai Tengah |
| | 10 | Kabupaten Tapin | Kabupaten Tapin |
| | 11 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| | 12 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| 13 | Kabupaten Balangan | Kabupaten Balangan | |
| 23 | Provinsi Kalimantan Timur | | |
| | 1 | Kota Balikpapan | Kota Balikpapan |
| | 2 | Kota Samarinda | Kota Samarinda |
| | 3 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| | 4 | Kota Bontang | Kota Bontang |
| | 5 | Kabupaten Berau | Kabupaten Berau |
| | 6 | Kabupaten Paser | Kabupaten Paser |
| | 7 | Kabupaten Kutai Timur | Kabupaten Kutai Timur |
| | 8 | Kabupaten Penajam Paser Utara | Kabupaten Penajam Paser Utara |
| 9 | Kabupaten Kutai Barat | Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Mahakam Ulu | |
| 24 | Provinsi Kalimantan Utara | | |
| | 1 | Kota Tarakan | Kota Tarakan |
| | 2 | Kabupaten Bulungan | Kabupaten Bulungan |
| | | | Kabupaten Tana Tidung |
| | 3 | Kabupaten Nunukan | Kabupaten Nunukan |
| 4 | Kabupaten Malinau | Kabupaten Malinau | |
| 25 | Provinsi Sulawesi Utara | | |
| | 1 | Kota Manado | Kota Manado |
| | 2 | Kota Bitung | Kota Bitung |
| | 3 | Kabupaten Minahasa Utara | Kabupaten Minahasa Utara |
| | 4 | Kabupaten Bolaang Mangondow | Kabupaten Bolaang Mangondow |
| | | | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan |
| | | | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur |
| | 5 | Kabupaten Minahasa | Kabupaten Minahasa |
| | 6 | Kabupaten Minahasa Selatan | Kabupaten Minahasa Selatan |
| | 7 | Kota Tomohon | Kota Tomohon |
| | 8 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Kabupaten Kepulauan Sangihe |
| | 9 | Kabupaten Kepulauan Talaud | Kabupaten Kepulauan Talaud |
| | 10 | Kota Kotamobagu | Kota Kotamobagu |
| 11 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Kabupaten Minahasa Tenggara | |
| 12 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | |
| 13 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | |

| NO | KANTOR PERTANAHAN | WILAYAH KERJA | |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 26 | Provinsi Sulawesi Tengah | | |
| | 1 | Kota Palu | Kota Palu |
| | 2 | Kabupaten Donggala | Kabupaten Donggala |
| | 3 | Kabupaten Banggai | Kabupaten Banggai |
| | 4 | Kabupaten Parigi Moutong | Kabupaten Parigi Moutong |
| | 5 | Kabupaten Poso | Kabupaten Poso |
| | 6 | Kabupaten Toli-toli | Kabupaten Toli-toli |
| | 7 | Kabupaten Morowali | Kabupaten Morowali |
| | | | Kabupaten Morowali Utara |
| | 8 | Kabupaten Tojo Una-una | Kabupaten Tojo Una-una |
| | 9 | Kabupaten Buol | Kabupaten Buol |
| 10 | Kabupaten Banggai Kepulauan | Kabupaten Banggai Kepulauan | |
| | | Kabupaten Banggai Laut | |
| 11 | Kabupaten Sigi | Kabupaten Sigi | |
| 27 | Provinsi Sulawesi Selatan | | |
| | 1 | Kota Makassar | Kota Makassar |
| | 2 | Kabupaten Gowa | Kabupaten Gowa |
| | 3 | Kabupaten Bone | Kabupaten Bone |
| | 4 | Kabupaten Maros | Kabupaten Maros |
| | 5 | Kota Parepare | Kota Parepare |
| | 6 | Kabupaten Luwu Timur | Kabupaten Luwu Timur |
| | 7 | Kabupaten Luwu Utara | Kabupaten Luwu Utara |
| | 8 | Kabupaten Wajo | Kabupaten Wajo |
| | 9 | Kota Palopo | Kota Palopo |
| | 10 | Kabupaten Sidenreng Rappang | Kabupaten Sidenreng Rappang |
| | 11 | Kabupaten Bulukumba | Kabupaten Bulukumba |
| | 12 | Kabupaten Pinrang | Kabupaten Pinrang |
| | 13 | Kabupaten Luwu | Kabupaten Luwu |
| | 14 | Kabupaten Takalar | Kabupaten Takalar |
| | 15 | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | Kabupaten Pangkajene Kepulauan |
| | 16 | Kabupaten Soppeng | Kabupaten Soppeng |
| | 17 | Kabupaten Sinjai | Kabupaten Sinjai |
| | 18 | Kabupaten Bantaeng | Kabupaten Bantaeng |
| | 19 | Kabupaten Barru | Kabupaten Barru |
| | 20 | Kabupaten Enrekang | Kabupaten Enrekang |
| | 21 | Kabupaten Jeneponto | Kabupaten Jeneponto |
| | 22 | Kabupaten Kepulauan Selayar | Kabupaten Kepulauan Selayar |
| | 23 | Kabupaten Tana Toraja | Kabupaten Tana Toraja |
| 24 | Kabupaten Toraja Utara | Kabupaten Toraja Utara | |
| 28 | Provinsi Sulawesi Tenggara | | |
| | 1 | Kota Kendari | Kota Kendari |
| | 2 | Kabupaten Kolaka | Kabupaten Kolaka |
| | | | Kabupaten Kolaka Timur |
| | 3 | Kota Baubau | Kota Baubau |
| | 4 | Kabupaten Konawe | Kabupaten Konawe |
| | | | Kabupaten Konawe Kepulauan |
| | 5 | Kabupaten Konawe Selatan | Kabupaten Konawe Selatan |
| | 6 | Kabupaten Muna | Kabupaten Muna |
| Kabupaten Muna Barat | | | |
| 7 | Kabupaten Bombana | Kabupaten Bombana | |
| 8 | Kabupaten Kolaka Utara | Kabupaten Kolaka Utara | |

| NO | KANTOR PERTANAHAN | WILAYAH KERJA | |
|----|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 9 | Kabupaten Buton | |
| | | Kabupaten Buton Tengah | |
| | | Kabupaten Buton Selatan | |
| | 10 | Kabupaten Buton Utara | Kabupaten Buton Utara |
| | 11 | Kabupaten Wakatobi | Kabupaten Wakatobi |
| | 12 | Kabupaten Konawe Utara | Kabupaten Konawe Utara |
| 29 | Provinsi Gorontalo | | |
| | 1 | Kota Gorontalo | Kota Gorontalo |
| | 2 | Kabupaten Gorontalo | Kabupaten Gorontalo |
| | 3 | Kabupaten Bonebolango | Kabupaten Bonebolango |
| | 4 | Kabupaten Pohuwato | Kabupaten Pohuwato |
| | 5 | Kabupaten Boalemo | Kabupaten Boalemo |
| | 6 | Kabupaten Gorontalo Utara | Kabupaten Gorontalo Utara |
| 30 | Provinsi Sulawesi Barat | | |
| | 1 | Kabupaten Mamuju | Kabupaten Mamuju |
| | | | Kabupaten Mamuju Tengah |
| | 2 | Kabupaten Polewali Mandar | Kabupaten Polewali Mandar |
| | 3 | Kabupaten Majene | Kabupaten Majene |
| | 4 | Kabupaten Mamuju Utara | Kabupaten Mamuju Utara |
| | 5 | Kabupaten Mamasa | Kabupaten Mamasa |
| 31 | Provinsi Maluku | | |
| | 1 | Kota Ambon | Kota Ambon |
| | 2 | Kabupaten Maluku Tengah | Kabupaten Maluku Tengah |
| | | | Kabupaten Seram Bagian Barat |
| | 3 | Kabupaten Maluku Tenggara | Kabupaten Maluku Tenggara |
| | | | Kota Tual |
| | 4 | Kabupaten Buru | Kabupaten Kepulauan Aru |
| | | | Kabupaten Buru |
| | 5 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | Kabupaten Buru Selatan |
| | | | Kabupaten Maluku Tenggara Barat |
| | 6 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Kabupaten Maluku Tenggara Barat |
| | | | Kabupaten Maluku Barat Daya |
| | | | Kabupaten Seram Bagian Timur |
| 32 | Provinsi Maluku Utara | | |
| | 1 | Kota Ternate | Kota Ternate |
| | 2 | Kota Tidore Kepulauan | Kota Tidore Kepulauan |
| | 3 | Kabupaten Halmahera Selatan | Kabupaten Halmahera Selatan |
| | 4 | Kabupaten Halmahera Barat | Kabupaten Halmahera Barat |
| | | | Kabupaten Pulau Taliabu |
| | 5 | Kabupaten Kepulauan Sula | Kabupaten Kepulauan Sula |
| | 6 | Kabupaten Halmahera Tengah | Kabupaten Halmahera Tengah |
| | | | Kabupaten Halmahera Timur |
| | 7 | Kabupaten Halmahera Utara | Kabupaten Halmahera Utara |
| | | | Kabupaten Pulau Morotai |
| 33 | Provinsi Papua | | |
| | 1 | Kota Jayapura | Kota Jayapura |
| | 2 | Kabupaten Mimika | Kabupaten Mimika |
| | 3 | Kabupaten Jayapura | Kabupaten Jayapura |
| | 4 | Kabupaten Merauke | Kabupaten Merauke |
| | | | Kabupaten Boven Digoel |
| | | | Kabupaten Mappi |
| | | | Kabupaten Asmat |

| NO | KANTOR PERTANAHAN | WILAYAH KERJA | |
|----|--------------------------|---------------------------|---|
| | 5 | Kabupaten Nabire | Kabupaten Nabire Kabupaten Dogiyai |
| | 6 | Kabupaten Biak Numfor | Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Supiori |
| | 7 | Kabupaten Jayawijaya | Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Yahukimo Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Tolikara Kabupaten Nduga Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Yalimo |
| | 8 | Kabupaten Kepulauan Yapen | Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Waropen |
| | 9 | Kabupaten Keerom | Kabupaten Keerom |
| | 10 | Kabupaten Sarmi | Kabupaten Sarmi Kabupaten Mamberamo Raya |
| | 11 | Kabupaten Puncak Jaya | Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Puncak |
| | 12 | Kabupaten Paniai | Kabupaten Paniai Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Deiyai |
| | 34 | Provinsi Papua Barat | |
| | 1 | Kabupaten Manokwari | Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Pegunungan Arfak |
| | 2 | Kabupaten Teluk Wondama | Kabupaten Teluk Wondama |
| | 3 | Kota Sorong | Kota Sorong Kabupaten Maybrat |
| 4 | Kabupaten Tambrauw | Kabupaten Tambrauw | |
| 5 | Kabupaten Sorong | Kabupaten Sorong | |
| 6 | Kabupaten Fakfak | Kabupaten Fakfak | |
| 7 | Kabupaten Sorong Selatan | Kabupaten Sorong Selatan | |
| 8 | Kabupaten Raja Ampat | Kabupaten Raja Ampat | |
| 9 | Kabupaten Kaimana | Kabupaten Kaimana | |
| 10 | Kabupaten Teluk Bintuni | Kabupaten Teluk Bintuni | |

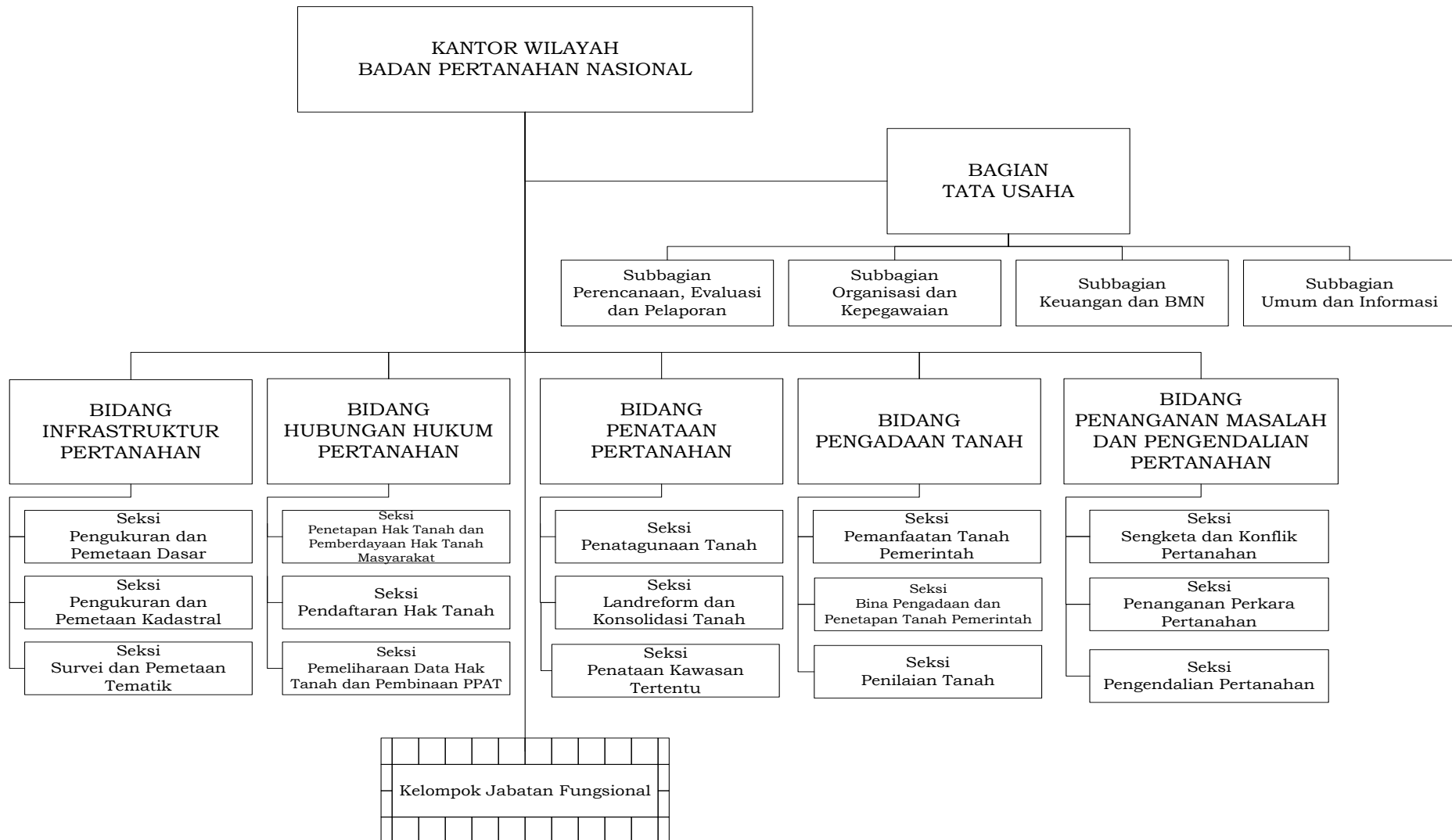
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

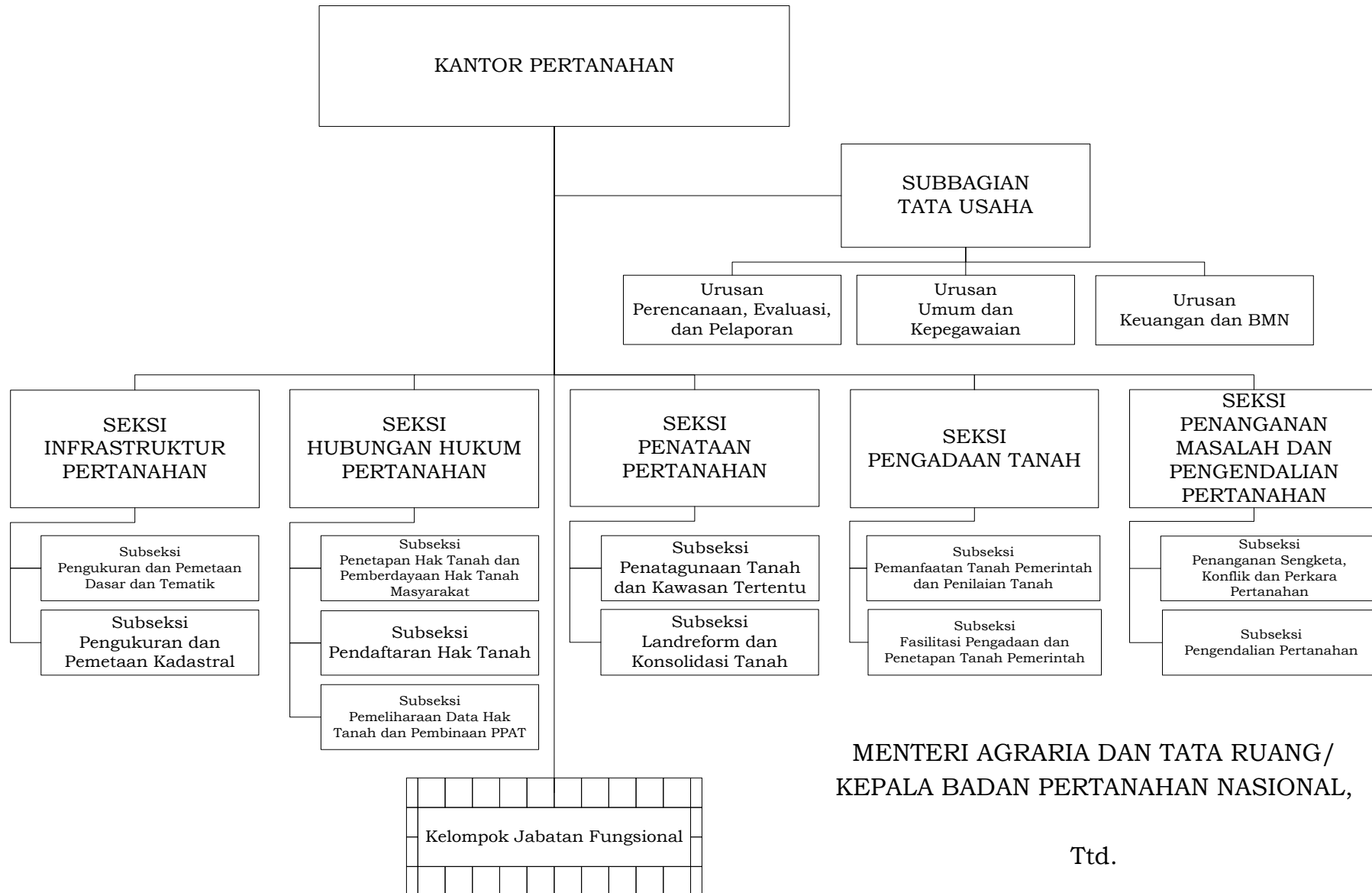
SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 38 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

BAGAN ORGANISASI
 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI



**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA**



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL